



Konsep Dasar Administrasi Pendidikan

Annisa Rahma Syafira¹, Bulan Rafiqoh Disyah², Eka Febrianti³, Ellysa⁴

^{1,2,3,4} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: annisarahma081006@gmail.com.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dengan jelas konsep dasar dari komponen-komponen administrasi pendidikan, termasuk pemahaman, tujuan, ruang lingkup, fungsi, dan Prinsip-prinsip dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah komponen kunci dari manajemen lembaga pendidikan yang beroperasi secara efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Penulis menganalisis berbagai bahan referensi ilmiah yang relevan dan terbaru seperti buku teks dan jurnal nasional serta internasional, serta dokumen kebijakan pendidikan yang diterbitkan sejak 2020 hingga sekarang. Temuan menunjukkan bahwa administrasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan tata kelola pendidikan yang berkualitas. Administrasi pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengelolaan penilaian terhadap pelaksanaan tujuan pendidikan nasional. Prinsip dasar praktik administrasi pendidikan modern adalah prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Semoga, studi ini dapat memberikan ide-ide baru bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan pendidikan untuk meningkatkan keadaan tata kelola pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Administrasi Pendidikan, Konsep Dasar, Manajemen Pendidikan, Mutu Pendidikan, Tata Kelola.

ABSTRACT

This study aims to clearly analyze the basic concepts of the components of educational administration, including the understanding, objectives, scope, functions, and basic principles of educational administration. Educational administration is a key component of the management of educational institutions that operate effectively and efficiently. The research method used is library research. The author analyzed various relevant and recent scientific reference materials such as textbooks and national and international journals, as well as educational policy documents published from 2020 to the present. The findings indicate that educational administration has a very important role in developing quality educational governance. Educational administration includes planning, organizing, implementing, and managing assessments of the implementation of national educational goals. The basic principles of modern educational administration practice are the principles of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability. Hopefully, this study can provide new ideas for practitioners, academics, and educational policymakers to improve the state of educational governance in Indonesia.

Keywords: Educational Administration, Basic Concepts, Educational Management, Educational Quality, Governance.

PENDAHULUAN

Studi tentang administrasi pendidikan memiliki arti yang cukup penting di era evolusi sistem pendidikan suatu bangsa terutama dalam kasus Indonesia. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi sebuah bangsa, dan dalam mengembangkan potensi penuh sumber daya manusia suatu bangsa, pengelolaan sistem infrastruktur pendidikan harus efektif dan memadai, agar dapat mencapai prioritas dari tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Banyak lembaga pendidikan meraih keberhasilan sebagai hasil dari administrasi yang efektif, selain dari kurikulum yang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas. Administrasi yang tertib, jelas, dan bertanggung jawab merupakan prasyarat bagi lingkungan pendidikan yang mendukung bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Sejumlah lembaga pendidikan, terlepas dari undang-undang administrasi yang progresif, masih mengalami masalah administratif seperti kurangnya koordinasi, penugasan fungsi administratif yang tidak jelas, dan ketidakmampuan mendokumentasikan. Hal ini menunjukkan adanya kebodohan yang masih berlaku di bidang administrasi pendidikan. Studi-studi membuktikan bahwa terdapat korelasi positif antara kualitas administrasi sekolah dan kinerja siswa, serta kepuasan kerja guru. Oleh karena itu, studi yang sedang dipertimbangkan memiliki signifikansi teoritis maupun praktis dalam peningkatan sistem pendidikan dan karenanya akan menjadi titik awal yang baik untuk pertumbuhan masa depan administrasi pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (Assingily, 2021). Metode ini mengandalkan analisis sumber tertulis. Pendekatan penelitian perpustakaan mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan memeriksa literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur ini dapat meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, atau sumber digital terkait. Metode ini dipilih karena membantu mempelajari dan mensintesis berbagai teori, konsep, dan temuan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan administrasi pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Hakikat Administrasi Pendidikan

Secara etimologi, istilah "administrasi" diambil dari bahasa Latin, yang terdiri dari *ad* yang berarti secara mendalam dan *ministrare* yang berarti memberikan layanan, membantu, atau memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, jika di tafsirkan secara harfiah, administrasi mengacu pada upaya untuk memberikan pelayanan dengan intensif dan komprehensif (Pahliana & At, 2024). Pemahaman ini menjadi landasan bagi wawasan bahwa inti dari administrasi termasuk dalam pendidikan adalah mengutamakan layanan yang terbaik, bukan hanya terfokus pada elemen-elemen birokrasi atau tahapan prosedur. Seiring waktu, arti administrasi dalam konteks pendidikan telah mengalami pergeseran pemahaman yang signifikan. Pengertian ini menjadi pijakan pemahaman bahwa esensi dari administrasi termasuk dalam pendidikan berorientasi pada penyediaan layanan yang maksimal, bukan hanya berfokus pada komponen-komponen birokratis atau prosedur. Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman administrasi pendidikan telah meluas dengan pemahaman yang penting.

Administrasi pendidikan bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dalam hal proses, administrasi pendidikan mencakup serangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam konteks pendidikan yang dilakukan secara terstruktur untuk meraih sasaran pendidikan yang telah ditetapkan (Akhyari & Fatimah, 2024). Dari sudut pandang sistem, administrasi pendidikan meliputi semua elemen yang berinteraksi serta berkolaborasi dalam mengelola sumber daya pendidikan, baik manusia maupun materi, dengan cara yang efisien dan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kombinasi dari kedua sudut pandang ini menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh bahwa administrasi pendidikan bukan hanya sekadar alat manajerial, tetapi juga merupakan sistem nilai yang menghubungkan elemen teknis dan humanis dalam pengelolaan pendidikan.

Sangat penting untuk membedakan administrasi pendidikan dari manajemen pendidikan, dua istilah yang sering saling dipertukarkan tetapi memiliki makna yang berbeda. Administrasi pendidikan lebih berfokus pada aspek pengaturan kebijakan dan kelembagaan dalam skala besar, sementara manajemen pendidikan lebih berkaitan dengan realisasi teknis di tingkat lembaga pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, kedua istilah tersebut dipandang saling melengkapi, mengingat dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia keduanya berfungsi dalam sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan (Firmansyah & Mashuri, 2022). Sinergi antara dimensi kebijakan dan pelaksanaan inilah yang menjadikan administrasi pendidikan sebagai suatu disiplin yang rumit dan juga sangat penting.

Tujuan Administrasi Pendidikan

Tujuan dari administrasi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari maksud pendidikan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar mereka menjadi individu yang beriman, berpengalaman, terampil, inovatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, administrasi pendidikan berfungsi sebagai enabler—mekanisme penunjang yang memungkinkan tujuan pendidikan tersebut dapat diwujudkan secara sistematis dan terstruktur. Dewantara (2024) dalam kajiannya menegaskan bahwa tujuan utama administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui pengelolaan sumber daya yang optimal.

Secara lebih terperinci, tujuan administrasi pendidikan dapat diidentifikasi dalam empat dimensi. Pertama, dimensi efisiensi, yaitu mendayagunakan seluruh sumber daya pendidikan yang tersedia secara hemat namun tetap menghasilkan output yang maksimal. Kedua, dimensi efektivitas, yaitu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pendidikan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Ketiga, dimensi akuntabilitas, yaitu membangun sistem pertanggungjawaban yang transparan dan terukur atas setiap penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai. Keempat, dimensi keberlanjutan, yaitu membangun kapasitas kelembagaan yang mampu beradaptasi dan berkembang secara berkelanjutan menghadapi berbagai dinamika dan tantangan pendidikan (Marpaung dkk., 2023). Keempat dimensi ini saling melengkapi dan membentuk konstruk tujuan administrasi pendidikan yang komprehensif.

Fungsi-Fungsi Administrasi Pendidikan

Fungsi administrasi pendidikan merupakan komponen operasional yang menentukan bagaimana tujuan administrasi dapat dicapai secara sistematis. Berbasis analisis terhadap tujuh artikel jurnal yang dikaji, terdapat lima fungsi utama administrasi pendidikan yang secara konsisten diidentifikasi dan diakui dalam literatur akademik Indonesia.

Fungsi pertama adalah perencanaan (*planning*). Perencanaan merupakan fungsi awal dan paling fundamental dalam administrasi pendidikan, karena seluruh aktivitas manajerial berangkat dari sini. Perencanaan mencakup penetapan visi dan misi lembaga, penyusunan program kerja tahunan, penentuan target capaian, dan alokasi sumber daya. Perencanaan yang baik bersifat fleksibel, realistis, dan berorientasi pada tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang sekaligus. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka misalnya, perencanaan administrasi mencakup penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing sekolah.

Fungsi kedua adalah pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian berkenaan dengan pembagian tugas, penetapan struktur organisasi, dan pengalokasian wewenang serta tanggung jawab kepada seluruh komponen lembaga pendidikan. Pengorganisasian yang efektif menghasilkan struktur kerja yang jelas, rantai komando yang tidak ambigu, dan mekanisme koordinasi yang efisien. Dalam satuan pendidikan, fungsi pengorganisasian tecermin dalam penyusunan job description yang jelas bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga staf administrasi (Saputra, 2022).

Fungsi ketiga adalah pengarahan (*directing*) dan fungsi keempat adalah koordinasi (*coordinating*). Pengarahan mencakup pemberian bimbingan, motivasi, dan dorongan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pemimpin yang efektif dalam konteks administrasi pendidikan mampu menginspirasi dan menggerakkan seluruh komponen sekolah menuju satu tujuan bersama. Sementara itu, koordinasi berkaitan dengan sinkronisasi berbagai kegiatan dan program agar tidak terjadi tumpang-tindih atau konflik antarbagian dalam lembaga pendidikan. Koordinasi yang baik mensyaratkan komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkesinambungan di semua lini organisasi pendidikan (Putri dkk., 2024).

Fungsi kelima adalah pengawasan (*controlling*). Pengawasan merupakan mekanisme pengendalian yang memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dalam administrasi pendidikan, pengawasan tidak hanya berdimensi birokratis—seperti pemeriksaan dokumen dan laporan—tetapi juga mencakup supervisi klinis terhadap proses pembelajaran, monitoring capaian peserta didik, dan evaluasi kinerja guru serta tenaga kependidikan. Pengawasan yang efektif bersifat formatif dan korektif, artinya tidak hanya mengidentifikasi penyimpangan tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan (Dewantara, 2024).

Prinsip-prinsip Administrasi Pendidikan

Prinsip-prinsip administrasi pendidikan berfungsi sebagai panduan normatif yang mengarahkan praktik pengelolaan pendidikan agar selaras dengan nilai-nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam sistem pendidikan nasional. Kajian terhadap

literatur yang dianalisis mengidentifikasi empat prinsip utama yang secara konsisten dikemukakan.

Prinsip pertama adalah demokratis. Administrasi pendidikan yang demokratis mensyaratkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan—kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan komite sekolah—dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan lembaga pendidikan. Prinsip ini tidak hanya bermakna prosedural, tetapi juga substansial: setiap suara dan kepentingan dari berbagai komponen komunitas sekolah harus didengar dan dipertimbangkan secara adil. Dalam konteks Indonesia, prinsip demokratis dalam administrasi pendidikan tercermin dalam mekanisme musyawarah dan mufakat yang merupakan nilai budaya lokal sekaligus prinsip konstitusional (Firmansyah & Mashuri, 2022).

Prinsip kedua adalah efisiensi. Efisiensi dalam administrasi pendidikan berarti memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia—baik sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, maupun waktu—untuk menghasilkan output pendidikan yang optimal. Efisiensi bukan berarti penghematan semata, melainkan optimalisasi: bagaimana setiap rupiah anggaran pendidikan dan setiap jam kerja tenaga pendidik dapat memberikan dampak terbesar bagi peningkatan mutu pembelajaran. Prinsip ketiga adalah efektivitas, yakni kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat sasaran. Efektivitas berkaitan erat dengan relevansi program dan kegiatan yang dirancang terhadap kebutuhan nyata peserta didik dan tuntutan masyarakat. Prinsip keempat adalah berkelanjutan (*sustainability*), yang menekankan bahwa administrasi pendidikan harus dikelola dengan visi jangka panjang, membangun kapasitas yang tidak hanya mampu menjawab tantangan saat ini tetapi juga mampu beradaptasi dan berkembang di masa mendatang (Dewantara, 2024).

Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan

Ruang lingkup administrasi pendidikan mencerminkan keluasan bidang garapan yang harus dikelola oleh administrator pendidikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap tujuh jurnal yang dikaji, terdapat enam bidang garapan utama yang secara konsisten diidentifikasi sebagai ruang lingkup administrasi pendidikan di Indonesia.

Bidang pertama adalah administrasi kurikulum, yang mencakup perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum di satuan pendidikan. Administrasi kurikulum memastikan bahwa program pembelajaran yang dirancang relevan, terstruktur, dan mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Bidang kedua adalah administrasi personel atau kepegawaian, yang meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan profesional, penilaian kinerja, hingga pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Kualitas pengelolaan personel sangat menentukan kinerja keseluruhan lembaga pendidikan (Putri dkk., 2024).

Bidang ketiga adalah administrasi keuangan, yang mencakup penyusunan anggaran (RKAS), pengelolaan dana BOS dan sumber pembiayaan lainnya, pelaksanaan belanja, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi isu krusial, mengingat tingginya tuntutan publik terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan bebas dari korupsi. Bidang keempat adalah administrasi sarana dan prasarana, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset pendidikan. Ketersediaan sarana-prasarana yang memadai merupakan prasyarat

penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas (Dewantara, 2024).

Bidang kelima adalah administrasi peserta didik, yang mencakup penerimaan peserta didik baru, pengelolaan data dan rekam jejak akademik, pembinaan dan bimbingan, serta pengelolaan kelulusan. Administrasi peserta didik yang baik memastikan bahwa setiap individu mendapat layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Bidang keenam adalah administrasi hubungan sekolah dan masyarakat (humas), yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan seluruh pemangku kepentingan eksternal, termasuk orang tua, komunitas, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Humas yang efektif membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan sekaligus membuka peluang kemitraan yang saling menguntungkan (Marpaung dkk., 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif konsep dasar administrasi pendidikan yang mencakup pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan ruang lingkupnya berdasarkan analisis terhadap tujuh jurnal ilmiah terpilih yang diterbitkan pada periode 2022–2024. Hasil kajian menegaskan bahwa administrasi pendidikan merupakan sistem pengelolaan yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat dipahami secara memadai hanya dari satu aspek tunggal. Lima fungsi utama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan, beroperasi secara sinergis dan saling ketergantungan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Empat prinsip fundamental, demokratis, efisiensi, efektivitas, dan berkelanjutan, memberikan panduan normatif yang memastikan bahwa fungsi-fungsi tersebut dijalankan tidak hanya secara teknis yang benar, tetapi juga secara etis yang bertanggung jawab. Sementara itu, keenam ruang lingkup, kurikulum, personel, keuangan, sarana-prasarana, peserta didik, dan hubungan masyarakat, merupakan domain konkret di mana seluruh proses administrasi tersebut diaktualisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Fadlillah, A. D., & Fatimah, M. (2024). Konsepsi dan teori administrasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.54259/jpi.v6i1.xxxx>
- Dewantara, D. (2024). Konsep dasar administrasi pendidikan: Pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan ruang lingkupnya. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(3), 1–12. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/view/2848>
- Firmansyah, B., & Mashuri, M. (2022). *Systematic literature review* fungsi dan tujuan administrasi pendidikan di Indonesia. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 4(2), 68–79. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v4i2.xxxx>
- Marpaung, N., Novalina, S., & At, A. (2023). Administrasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 100–104. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/53>

- Pahliana, S., & At, A. (2024). Konsep dan teori administrasi pendidikan. *Economic and Business Management International Journal*, 6(1), 1–5. <https://www.mandycmm.org/index.php/eabmij/article/view/556>
- Putri, K., Aini, N., Safitri, R., & Siregar, R. W. (2024). Sistem administrasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *At-Tadzkir: Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.xxxx/at-tadzkir.v3i1.xxxx>
- Saputra, A. L. G. (2022). Urgensi administrasi pendidikan dalam dunia pendidikan. *Journal J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan, Penelitian dan Kajian Keislaman*, 1(2), 15–21. <https://doi.org/10.xxxx/j-mpi.v1i2.xxxx>